

**PENGARUH PERSEPSI TERHADAP SIKAP PENGUSAHA
PADA PENERTIBAN PENGUSAHA INFORMAL
DI JALAN MALIOBORO DAN SEKITARNYA**

Sumanto

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Immanuel (UKRIM)

ABSTRACT

Informal business sector is not covered in anything small entrepreneur (UKM) using formal clauses because their existence is not inscribed formally. According to Ginting (Jurnal Teknik Simetrika vol 3 No 3 December 2004), informal business sector is economics business which its operation doesn't fulfil standard of government clauses. Informal sector group which is famous by the name of "pedagang kaki lima" (PKL) has become primadona in economic development discourse nationally. However, the sector is not represented in UKM discourse if the discourse applies formal qualification (for example business licence, minimum capital clauses, minimum clauses of number of labours, etc)

The 1977 monetary crisis impacted on declining informal business sector activities. This impact was not only felt by small and middle entrepreneurs but also the owner of big capital as well. Many industrial sector entrepreneurs hit by crisis were unable to stay and closed their business activities. For the shake of survival their remaining capital and properties, they fired their employee on a large scale. As a result, unemployment number increased sharply. Unemployment problems happened before just crisis has not overcome added by new unemployment problems. Number of unemployment increased to became around 50 millions. This means about 20% from Indonesia resident amounts or almost 30% from productive age resident amounts, that is 160 million (Warta Ekonomi, March 2003). It means, in 2006 the numbers of unemployment increased sharply compare with unemplloymnt before. According to BPS, informal sector can accomodate 70 % labor force these days (Kompas, April 2006). Bankrupt of formal sector caused the increasing of unemployment and at the same time informal business sector (PKL) was success to function as "receiver tank" channelling unemployment. Although PKL has been success playing an important role in overcoming unemployment problem on the happening of economics crisis, but in normal situation their existence are often threatened.

The policy of Pemkot Yogyakarta in arranging PKL business (cloister merchant) in Malioboro street and its surroundings actually have long enough threatened the existence of PKL. The policy has been implemented since Perda No 2 tahun 2002 implemented in 2002. After the time of that hitherto, Pemkot always arranges the existence of PKL in order to beautifies town and strengthens economics of local people. Pemkot has succeeded in building PKL perception to governmental policy (in arranging PKL in Malioboro street and its surroundings). Result of this research indicates that frequency distribution of perception and attitude of merchant are negatively skewed. . The number of low perception goup is only 30%, while the medium 35,5% and the high is 34,5% . For attitude variable, the number of low group is 20,9%; medium 39,1% and

high 40%. Result of this research also indicates that model of entrepreneur perception influence to attitude built in this research, supported by the empirical data (*chi-square* 10,674 sign 0,05, *GFI*0,970, *AGFI*=0,910, *TLI*=0,963, *CFI*=0,983, *NFI*=0,953, *RMSEA*, 0,069) with the meaning perception influence to attitude of entrepreneur hypothesis supported by the empirical data.

Keywords: *Informal business sector, entrepreneur*

PENDAHULUAN

Terdesaknya eksistensi pengusaha kecil juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang jumlahnya mencapai 9.810 unit dan menyerap 69.341 tenaga kerja, belum termasuk PKM non formal yang jumlahnya diperkirakan 300.000 unit (Kompas, 18 Oktober 2005). Jumlah tersebut relatif signifikan bagi kehidupan perekonomian DIY mengingat secara makro mereka mampu memberikan kontribusi 60% komoditas ekspor DIY dan dengan jumlah penduduk DIY yang hanya 3,5 juta orang. Ironisnya, menurut Budi Wahyuni, Ketua Tim Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta, keberadaan PKM belum ditunjang dengan kebijaksanaan yang berfihak kepada mereka. Keberadaan mereka terancam dengan semakin maraknya bisnis orang bermodal besar yang membangun mall, supermarket, dan hypermarket di wilayah kerja mereka (Kompas, 18 Oktober 2005).

Semenjak Orde Baru hingga saat ini, perkembangan industri telah mengubah struktur perekonomian Indonesia. Antara tahun 1970an hingga tahun 2000an, peranan sektor industri meningkat pesat meninggalkan sektor pertanian yang kontribusinya semakin menurun. Pada tahun 2006 atau dalam waktu hampir empat dasawarsa peranan sektor industri manufaktur telah mencapai 28 persen dari PDB. Sampai tahun 2007, persentase sumbangan sektor industri sedikit menurun menjadi 27,4 persen.

Sektor industri manufaktur Indonesia tumbuh jauh lebih lamban sesudah krisis 1997. Sejak krisis ekonomi Asia sampai 2007, pertumbuhan sektor industri manufaktur hanya meningkat dengan laju satu digit. Perkembangan yang tersendat-sendat ini jauh berbeda dengan masa sebelum krisis pada saat sektor industri manufaktur dapat tumbuh dengan dua digit (Kuncoro, 2007). Selama tahun 2004-2007 industri tumbuh sekitar 4,6-6,4%.

Dalam konstelasi semacam ini, bisa difahami mengapa terjadi dualisme dan lemahnya keterkaitan industri kecil dengan industri besar. Dualisme ini muncul karena orientasi industrialisasi berbasis pada modal besar dan teknologi tinggi, namun kurang berdasar atas kekuatan ekonomi rakyat (Kuncoro, 1995). Pengalaman Taiwan, sebagai perbandingan, justru menunjukkan ekonominya dapat tumbuh pesat karena ditopang oleh sejumlah usaha kecil dan menengah yang disebut *community based industry*. Perkembangan industri moderen di Taiwan, yang sukses menembus pasar global, ternyata ditopang oleh kontribusi usaha kecil dan menengah yang dinamik. Keterkaitan yang erat antara si besar dan si kecil lewat program *subcontracting* terbukti mampu menciptakan sinergi yang menopang perekonomian Taiwan.

Di negara kita strategi industrialisasi yang banyak mengandalkan akumulasi modal, proteksi, dan teknologi tinggi telah menimbulkan polarisasi dan

dualisme dalam proses pembangunan. Fakta menunjukkan sektor manufaktur yang modern hidup berdampingan dengan sektor pertanian yang tradisional ternyata kurang produktif. Dualisme dalam sektor manufaktur juga terjadi antara industri kecil dan rumah tangga (usaha sektor informal) yang berdampingan dengan industri menengah dan besar (Kuncoro, 2006). Berdasarkan fakta tersebut, ada disorientasi pelaksanaan strategi pemerintah dalam pengembangan dunia usaha yang ditandai dengan ketidakmampuan pemerintah membangun kemitraan secara adil antara usaha besar dan usaha sektor informal. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatur keberadaan pengusaha sektor informal menimbulkan persepsi dan sikap yang perlu diteliti untuk mengakomodasi tuntutan mereka.

Selama beberapa tahun terakhir ini, berbagai pola kemitraan antara usaha kecil dan besar pun telah dikembangkan. Pembinaan dan pengaturan terhadap pedagang informal terus dilakukan. Perda No 26 Tahun 2002 yang mengatur keberadaan pedagang informal sudah diberlakukan. Pertanyaan mendasar yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah: bagaimanakah persepsi dan sikap pengusaha informal terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatur keberadaan mereka? Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah pengaruh persepsi terhadap sikap pedagang informal pada kebijakan pemerintah dalam mengatur keberadaan mereka ?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Usaha mikro, kecil, dan menengah dan usaha sektor informal

Undang-undang mengenai UKM yang terbaru, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun

2008, tentang usaha mikro kecil dan menengah mengelompokkan pengusaha dengan definisi dan kriteria sebagai berikut:

1. Usaha Mikro
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2. Usaha Kecil
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
3. Usaha Menengah
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp

50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Istilah pengusaha kecil dan menengah (PKM) adalah pengganti istilah pengusaha kecil yang mengikuti perubahan nama Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil menjadi Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan (1990-1998). Istilah pengusaha kecil dan menengah dipertahankan ketika Zarkasih Nur sampai Alimarwan Hanan menjabat sebagai menteri (1999-2004). Pada waktu Suryadharma Ali menjabat menteri, nama itu diganti dengan nama pengusaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008.

Oleh karena istilah usaha kecil dan besar sudah lebih dahulu terkenal, membuat penyebutan pengusaha mikro, kecil, dan menengah - ketiga-tiganya - sering dirancukan dengan sebutan pengusaha kecil. Pengusaha mikro, kecil, dan menengah (PMKM) yang dimaksud dalam tulisan ini seperti yang dimaksud dalam UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1998 namun secara spesifik yang dimaksud adalah yang bergerak di sektor informal (pengusaha informal). Kelompok ini jumlahnya lebih besar dibanding PMKM formal akan tetapi mereka sering tidak terekspose atau tidak terwakili meskipun sering diwacanakan karena mereka sulit didata keberadaannya. Studi tentang PMKM umumnya dilakukan secara eksklusif pada pengusaha yang memiliki legalitas saja. Kelompok usaha ini termasuk

para pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan bisnis pada siang hari bahkan pada malam hari dengan lapak-lapak dan kereta dorongan. Kelompok usaha ini untuk selanjutnya dikategorikan dalam kelompok usaha informal. Kelompok usaha ini sudah sejak zaman penjajahan Belanda menjadi bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat dan pada zaman merdeka dapat menjadi keran penyelamat penyalur tenaga kerja ketika terjadi krisis, yang dalam penelitian ini disebut dengan pengusaha sektor informal.

Pada saat ini, keberadaan pengusaha mikro dan kecil di negara kita ibarat gunung es; yang terekspose hanyalah sebagian kecil dari jumlah yang sebenarnya. Jumlah UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai 9.810 unit, sementara itu yang bergerak di informal jumlahnya diperkirakan 300.000 unit (Kompas, 18 Oktober 2005). Badan Pusat Statistik (2003) menyebutkan bahwa 99,9% dari total UMKM adalah usaha kecil dan mikro. Menurut Badan Pusat Statistik (2003) jumlah UMKM adalah 42,4 juta yang memberikan sumbangan terhadap penerimaan devisa negara melalui kegiatan ekspor sebesar Rp 75,80 triliun (19,90%) dari total nilai ekspor dengan kontribusi dalam pembentukan PDB sebesar 56,70%. UMKM menyerap 79 juta tenaga kerja; menyumbang 99,40% dari total angkatan kerja dan dari jumlah tersebut hampir semuanya (99,99%) adalah usaha kecil dan mikro.

Peranan dan jumlah usaha mikro dan kecil di sektor informal sangat signifikan akan tetapi kelompok

usaha tersebut sering luput dari perhatian karena keberadaannya yang tidak memenuhi persyaratan formal. Meskipun tidak sering terekspose karena tidak memenuhi syarat secara formal, pengusaha informal adalah “*entrepreneur street fighter sejati*.” Mereka pandai memilih bidang bisnis yang barang/jasanya diminati pasar dan benar-benar dibutuhkan orang banyak meski jenis usahanya bukan sesuatu yang luar biasa. Pengusaha informal adalah orang yang realistis dan tidak mudah menyerah. Mereka umumnya memulai usaha karena keadaan yang memaksa; akibat kemiskinan, akibat kehilangan pekerjaan, PHK, dan sulitnya lapangan kerja di sektor formal. Mereka berusaha menjalani kegetiran hidup dengan mau bekerja keras, tabah, dan sabar. Meski pekerjaan tersebut sering dinggap “*inferior*” tapi karena kebutuhan hidup tidak dapat ditunda, mereka menjalani dengan tanpa banyak menuntut kepada orang lain. Meskipun tidak didukung permodalan dan kemampuan manajemen, dengan berbekal semangat mereka dapat terus eksis bahkan banyak yang berhasil menjadi pengusaha formal.

Sebagai pengusaha yang mandiri, pengusaha informal menjalankan usaha tanpa merengek-rengok fasilitas-khusus dari pemerintah dan bantuan kredit perbankan. Ajaibnya, ketika pengusaha yang bermain di ketiaknya perbankan ambruk karena krisis, mereka tetap eksis. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang justru usahanya berkembang. Sebenarnya merekalah yang pantas dijuluki pengusaha sejati karena mereka mampu menciptakan lapangan kerja

sendiri ketika pemerintah mengalami kesulitan mengatasi masalah pengangguran pada saat krisis ekonomi. Paska krisis ekonomi 1998 terjadi peningkatan angkatan kerja yang bekerja pada sektor informal. Dengan adanya krisis ekonomi menyebabkan sektor formal memberhentikan pekerja-pekerjanya. Para pekerja yang terkena PHK tersebut memasuki sektor informal dan melakukan kegiatan ekonomi yang berskala kecil sehingga jumlah pengusaha informal meningkat paska krisis. Berdasarkan data BPS tahun 2002 (*Benefit vol 11 2007*), daya serap sektor informal sesudah masa krisis meningkat dari 53,7 juta menjadi 62,4 juta. Dilihat dari segi positifnya, sektor informal mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, mampu menyerap angkatan kerja yang sekaligus sebagai katub pengaman terhadap pengangguran dan kerawanan sosial, serta menyediakan kebutuhan bahan pokok untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Setiap kegiatan usaha melibatkan kepentingan berbagai pihak yaitu pengusaha atau pemilik, pekerja, masyarakat pemasok bahan dan masyarakat konsumen, serta pemerintah. Hubungan industrial merupakan hubungan antara pelaku proses produksi barang maupun jasa (pengusaha), pekerja/serikat pekerja, dan pemerintah. Hubungan industrial bertujuan untuk menciptakan hubungan yang serasi, harmonis dan dinamis antara pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, masing-masing harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Keuntungan perusahaan dan pendapatan karyawannya merupakan sumber utama pendapatan negara melalui sistem pajak. Semakin besar sisa hasil usaha atau keuntungan perusahaan semakin besar potensi membayar pajak perusahaan. Semakin besar penghasilan pekerja semakin besar pula potensi membayar pajak penghasilan.

Meskipun hubungan pemerintah dengan pengusaha bukanlah hubungan langsung yang terjalin setiap hari, namun perlindungan pemerintah terhadap pengusaha dapat membantu membangun terciptanya hubungan industrial yang harmonis, yang memberikan rasa aman kepada pengusaha dalam menjalankan usahanya. Sebagai pembina pengusaha, pemerintah perlu terus mengikuti perkembangan tentang persepsi pengusaha berkaitan dengan berbagai kebijakan yang mereka buat agar terjadi kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara sikap obyek dan persepsi. Penelitian hubungan antara persepsi pelayanan terhadap sikap loyal pelanggan dilakukan oleh Arnantio Wijaya (2003). Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan uji statistik korelasi product moment diperoleh nilai $r_{xy} = 0,3920$ dengan $p=0,000$ ($p < 0,01$).

Penelitian Wahyuni (2002) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sikap loyal pelanggan pada toko Alfa Gudang Rabat, diperoleh hasil bahwa, selain faktor-faktor sarana dan ekonomis, juga dipengaruhi oleh citra. Menurut

Wahyuni, kegiatan berlangganan ditentukan oleh persepsi pelanggan yang disebut dengan citra perusahaan. Apabila citra itu positif maka sikap mereka juga positif yang diperlihatkan dalam perilaku yang disebut loyalitas pelanggan.

Perkembangan aktivitas di jalur utama Malioboro yakni di Jalan Malioboro, Ahmad Yani dan Panembahan Senopati, dimulai sekitar tahun 60-an ketika para seniman Yogyakarta sering berkumpul di sana. Perkembangan jalur utama Malioboro sebagai kawasan perdagangan dimulai dari munculnya orang Tionghoa yang mendirikan toko di sepanjang jalan tersebut. Pelebaran jalan dan pembangunan archade yang di depan toko selebar tiga meter pada tahun 1970 menjadi pemicu maraknya pedagang kaki lima di sana. Pelebaran jalan dan pembangunan arcade tersebut adalah sebagai realisasi himbauan presiden untuk membenahi Malioboro. Pembangunan arcade tersebut pada mulanya dimaksudkan sebagai tempat berlindung bagi pejalan kaki. Dalam perkembangan selanjutnya ternyata semakin banyak pedagang kaki lima memanfaatkan dan mengisi ruang - ruang kosong tersebut. Selanjutnya terjadi ekspansi kegiatan oleh pedagang kaki lima di siang hari dan lesehan di malam hari.

Adanya SK Walikotaamadya Dati II Yogyakarta No 056/KD/1987 yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur keberadaan PKL dianggap sebagai lampu hijau bagi para pedagang kaki lima tersebut untuk mencoba mengais keuntungan dan berdagang di Malioboro

khususnya di sepanjang jalur utama Malioboro tersebut.

Pada saat ini, Malioboro telah menjadi pusat perdagangan pedagang kaki lima dan menjadi tempat yang menggiurkan untuk berjualan pedagang kaki lima. Terbukti, sektor informal ini dapat menyerap tenaga kerja besar dan memungkinkan pedagang kaki lima berkembang dengan pesat dengan modal usaha yang relatif kecil. Keberadaan pedagang kaki lima kemudian menyebar pesat di sekitar kawasan tersebut. Dengan semakin berkembangnya pedagang kaki lima di sana maka intensitas aktivitas di jalan Malioboro dan sekitarnya menjadi semakin besar, terutama pada koridor Jl Malioboro dan jalan Ahmad Yani sehingga menimbulkan dampak negatif yaitu gangguan ketertiban yang disebabkan oleh aktivitas pedagang yang cenderung menggunakan ruang pejalan dan badan jalan dan mengganggu alur lalu lintas dan mengurangi keindahan jalan.

Jalan Malioboro cenderung semrawut karena aktivitas pedagang yang belum diatur dan kotor akibat oleh limbah yang dihasilkan dari aktivitas pedagang.

Akibat perkembangan intensitas aktivitas pedagang kaki lima di Malioboro juga menyebabkan timbulnya konflik pada kawasan tersebut; yaitu konflik antara pedagang kaki lima dengan pemerintah, dengan pedagang formal maupun dengan pengunjung Malioboro. Ketidaknyamanan pejalan kaki pengunjung Malioboro disebabkan oleh alih fungsi trotoar dan rendahnya kesadaran pedagang

untuk menjaga kebersihan sehingga mengakibatkan sulitnya penataan areal parkir, gangguan sirkulasi kendaraan dan semakin kumuhnya areal tersebut.

Pemerintah Kota telah mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Berbagai tindakan penataan dilaksanakan di Malioboro oleh Pemerintah Kota bertujuan untuk menertibkan aktivitas pedagang kaki lima. Bahkan Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto menganggap perlunya Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur penataan di dalam kawasan Malioboro dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi Malioboro sebagai *landmark* kota Yogyakarta dalam konteks bisnis dan budaya (*Kompas*, 22 September 2001).

Tindakan penataan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kota pada mulanya cenderung menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro berpendapat bahwa aktivitas pedagang kaki lima yang terjadi saat ini sudah tidak teratur dan mengganggu ketertiban sehingga membutuhkan tindakan dan peraturan yang tegas dalam penataannya. Pihak yang kontra dalam hal ini para pedagang kaki lima dan organisasi - organisasi sosial kemasyarakatan yang peduli terhadap para pedagang tersebut, menganggap tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota merupakan sewenang - wenang terhadap keberadaan para pedagang tersebut yang notabene termasuk golongan masyarakat tingkat bawah. Mereka beranggapan bahwa Pemerintah Kota telah bersikap tidak adil terhadap mereka.

Padahal mereka merupakan potensi dan aset wisata di Malioboro pada khususnya dan Yogyakarta pada umumnya. Keberadaan mereka di sepanjang koridor jalan Malioboro merupakan suatu ciri khas dan keunikan tersendiri yang tidak ada di daerah lain sehingga membuat wisatawan baik dalam maupun luar negeri pasti akan meluangkan waktu untuk mengunjungi Malioboro apabila berkunjung ke Yogyakarta.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah selama ini oleh para pedagang juga dianggap bersifat top down yang didominasi oleh pemerintah dan kurang menampung aspirasi pedagang sehingga mengakibatkan pedagang enggan untuk ditertibkan. Kurangnya sosialisasi peraturan dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan mengakibatkan sense of belonging pedagang terhadap Malioboro; mereka kurang menyadari perlunya menjaga kebersihan dan keindahan. Kebijakan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di Malioboro tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002, yang memuat ketentuan umum, lokasi, perizinan, syarat dan tata cara perizinan, kewajiban dan larangan, fasilitas pembinaan, pengawasan, ketentuan pidana, penyidikan, sanksi administratif, dan ketentuan penutup. Tindak lanjut peraturan daerah tersebut menimbulkan persepsi dan sikap pedagang yang beraneka ragam. Agar pedagang mendukung pelaksanaan Perda, persepsi pedagang perlu terus dibangun melalui sosialisasi dan pendekatan

yang membuat mereka tidak ketakutan kehilangan mata pencaharian

Berdasarkan penjelasan tersebut dirumuskan hipotesis bahwa ada pengaruh signifikan persepsi terhadap sikap pedagang informal pada kebijakan pemerintah dalam mengatur keberadaan mereka.

Melalui penelitian ini, peneliti akan membangun model hubungan persepsi dan sikap pengusaha informal terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam pemberdayaan pengusaha, dengan memberikan jawaban atas pertanyaan: Apakah ada pengaruh yang signifikan persepsi terhadap sikap pengusaha oleh adanya kebijakan dalam pemberdayaan usaha bidang informal? Pengembangan model hubungan persepsi dan sikap pedagang ini perlu dilakukan mengingat sering terjadinya kekerasan dalam penertiban keberadaan usaha informal di berbagai daerah dan perlawanan pengusaha.

Pembangunan persepsi pengusaha perlu dibangun secara benar oleh pemerintah agar terjadi sinergi dalam hubungan industrial, yaitu antara pengusaha – pemerintah – pekerja. Penertiban yang tidak didahului dengan pembangunan persepsi yang benar berpotensi untuk menimbulkan perlawanan ketika pemerintah melakukan penertiban. Titik temu kepentingan pemerintah dan pengusaha informal perlu terus menerus dicari agar semakin tercipta

METODE PENELITIAN

A. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah usaha informal di jalan Malioboro dan sekitarnya (105 orang) yang tersebar

di berbagai bidang usaha. Pemilihan sampel dengan stratified random sampling (dusun sebagai strata).

Kriteria pengusaha kecil dan menengah yang diteliti

1. Pengusaha sebagai pekerjaan utama
2. Masih bertahan menjalankan usaha
3. Terdaftar / tidak terdaftar
4. Tidak bekerja sama dengan pengusaha lain

B. Operasionalisasi Variabel dan Skala Pengukuran

Variabel dan Instrumen Penelitian

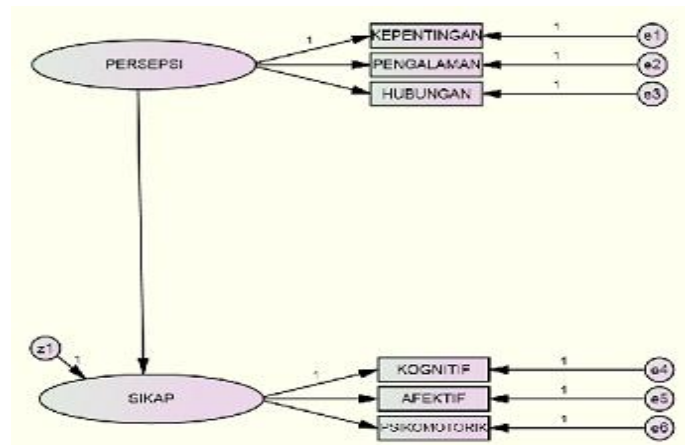
1. Variabel independen:

Persepsi pengusaha (penafsiran terhadap obyek berdasarkan kepentingan, pengalaman, hubungan)

2. Variabel dependen

Sikap pengusaha terhadap kebijaksanaan pemerintah (pernyataan evaluatif pada aspek kognisi, emosi, dan perilaku).

Gambar 1.
Model Hubungan antar Variabel Penelitian



Prosedur pengujian model adalah mengetahui *goodness of fit* (kesesuaian) antara model yang dihipotesiskan dan data sampel. Ketidaksesuaian antara model yang dihipotesiskan dengan data empiris terjadi oleh karena adanya *residual*.

C. Penyusunan Alat Ukur

Penyusunan item dilakukan berdasarkan hasil operasionalisasi variabel independen dan dependen sebagai berikut.

1. Variabel independen:

Persepsi Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah terhadap Keberadaan Usaha Sektor Informal (indikator: kepentingan, pengalaman, dan hubungan).

2. Variabel dependen

Sikap Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah terhadap Keberadaan Usaha Sektor Informal (indikator: kognitif, afektif, dan perilaku).

D. Validitas Konvergen dan Diskriminan Alat Ukur

Untuk menguji apakah indikator-indikator yang ada pada sebuah konstruk dapat menjelaskan konstruk masing-masing, dalam SEM, dapat dilakukan uji validitas konstruk (variabel laten) dengan uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan.

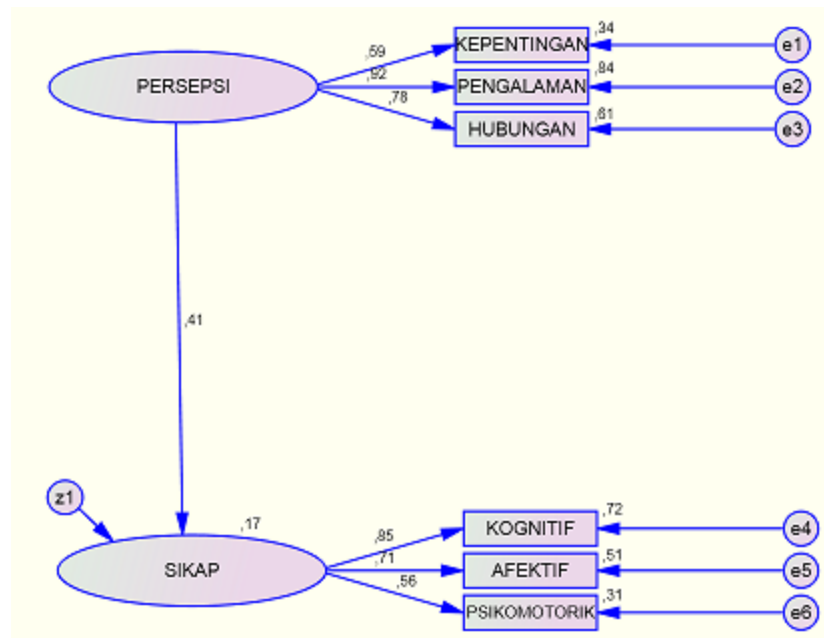
Validitas Konvergen

Validitas konvergen berkaitan dengan keakuratan pengukuran sehingga validitas tersebut mencerminkan kesesuaian aitem-

aitem dengan konstruk (variabel latennya). Ukuran faktor loading merupakan pertimbangan penting dalam menentukan validitas konvergen; semakin tinggi faktor loading menunjukkan semakin konvergen. Idealnya dibutuhkan nilai faktor loading 0,7 namun umumnya estimasi "standardized loading" sebesar 0,5 diperbolehkan (Hair et al., 2004).

Untuk menguji validitas konvergen dilakukan analisis hubungan konstruk dan indikator pada Gambar 2.

Gambar 2.
Analisis Hubungan Indikator dengan Konstruk



Tabel 1
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

			Estimate
SIKAP	<---	PERSEPSI	,409
KEPENTINGAN	<---	PERSEPSI	,585
PENGALAMAN	<---	PERSEPSI	,918
HUBUNGAN	<---	PERSEPSI	,781
KOGNITIF	<---	SIKAP	,850
AFEKTIF	<---	SIKAP	,714
PSIKOMOTORIK	<---	SIKAP	,560

Variance extracted (VE) dihitung dengan rumus:
$$\frac{\sum_{i=1}^n (\text{standardized factor loading})_i^2}{n}$$

$$\text{Persepsi} = \frac{(0.58)^2 + (0.92)^2 + (0.78)^2}{3} = \frac{0,34 + 0,85 + 0,61}{3} = \frac{1,79}{3} = 0,59$$

$$\text{Sikap} = \frac{(0.85)^2 + (0.71)^2 + (0.56)^2}{3} = \frac{0,72 + 0,51 + 0,31}{3} = \frac{1,54}{3} = 0,51$$

VE masing-masing konstruk mencapai 50% dan hasil analisis hubungan indikator dengan konstruk (Gambar 5. 2), semua indikator memiliki nilai faktor loading yang memenuhi syarat $\geq 0,5$.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah ukuran konsistensi internal dari indikator-

indikator sebuah variabel bentuk yang menunjukkan derajat sampai dimana masing-masing indikator mengindikasikan sebuah variabel bentuk yang umum. Ukuran yang digunakan adalah besarnya composite (construct) reliability. Composite reliability dihitung dengan rumus:

$$\text{Construct reliability} = \frac{(\sum \text{standardized loading})^2}{(\sum \text{standardized loading})^2 + \sum \varepsilon_j}$$

$$\begin{aligned} \text{Reliabilitas konstruk persepsi} &= \frac{(0,59 + 0,92 + 0,78)^2}{(0,59 + 0,92 + 0,78)^2 + (0,34 + 0,84 + 0,610)} \\ &= \frac{(2,29)^2}{(0,229^2) + 1,79} = \frac{5,2441}{5,2441 + 1,79} = \frac{5,441}{7,03341} = 0,774 \end{aligned}$$

Reliabilitas konstruk untuk masing-masing konstruk ternyata nilainya memenuhi kriteria nilai minimal yaitu antara 0,60 sampai 0,70 (Hair, et al; 2004)

Validitas diskriminan

Validitas diskriminan dapat dinilai dengan membandingkan persentase

variance extracted (VE) untuk salah satu konstruk dengan estimate kuadrat korelasi antara kedua konstruk tersebut. Apabila variance extracted (VE) lebih besar dibanding dengan estimate kuadrat korelasi maka syarat validitas diskriminan terpenuhi (Hair, et al; 2004).

Tabel 2
Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
SIKAP	,167
PSIKOMOTORIK	,314
AFEKTIF	,510
KOGNITIF	,722
HUBUNGAN	,611
PENGALAMAN	,843
KEPENTINGAN	,342

Berdasarkan hasil perhitungan di atas didapatkan VE untuk persepsi adalah 0,59 sedangkan estmasi kuadrat korelasi sikap adalah 0,167 (tabel 2) sehingga persyaratan validitas diskriminan terpenuhi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data Responden

Untuk mendapatkan gambaran mengenai responden yang memberikan informasi (data

penelitian) maka perlu ditampilkan data responden, yang dalam hal ini meliputi jenis kelamin, status perkawinan, umur, tingkat pendidikan, jenis usaha, lama menjadi pengusaha, perintisan usaha, totalitas menjalani pekerjaan, lama menjadi pengusaha, dan omzet per hari.

a. Jenis Kelamin

Distribusi responden berdasar jenis kelamin disajikan tabel 3.

Tabel 3 Distribusi responden berdasar jenis kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen
Laki-laki	62	56,4 %
Perempuan	48	43,6%
Total	110	100%

Responden yang berjumlah 110 terdistribusi dalam 62 (56,4 %) responden laki-laki dan 48 responden (43,6 %) perempuan.

b. Status Perkawinan

Distribusi responden berdasar status perkawinan disajikan tabel 4.

Tabel 4 Distribusi responden berdasar jenis status perkawinan

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen
Kawin	88	80 %
Tidak kawin	22	20 %
Total	110	100%

Responden yang berjumlah 110 terdistribusi dalam 88 (80 %) responden laki-laki dan 22 responden (20 %) perempuan.

c. Umur

Distribusi responden berdasar kelompok umur disajikan Tabel 5.

Tabel 5
Distribusi responden berdasar kelompok umur

Kelompok Usia	Frekuensi	Persen
25 thn s/d 39 thn	37	33,6 %
40 thn s/d 54 thn	61	55,5 %
55 thn s/d 66 thn	12	10,9 %
Total	110	100%
Mean = 42,37 tahun Minimum = 25 tahun Maksimum 66 tahun		

Responden didominasi pengusaha 40-54 tahun, yaitu sebanyak 61 orang (55,5 %).

d. Tingkat Pendidikan

Distribusi responden berdasar tingkat pendidikan disajikan Tabel 6.

Tabel 6 Distribusi responden berdasar tingkat pendidikan

Umur	Frekuensi	Persen
Tidak / tamat SD	11	10 %
Tamat SMP	28	25,5 %
Tamat SLTA	68	61,8 %
D3 ke atas	3	2,7 %
	110	100%

Distribusi responden berdasar tingkat pendidikan ternyata didominasi oleh tamatan SLTA, yaitu sebanyak 68 pengusaha (61,8 %).

e. Jenis Usaha

Distribusi responden berdasar jenis usaha disajikan Tabel 7.

Tabel 7
Distribusi responden berdasar tingkat pendidikan

Jenis Usaha	Frekuensi	Persen
Kerajinan	42	38,2 %
Pakaian	24	21,8 %
Oleh-oleh/makanan	5	4,5 %
Warung lesehan	28	25,5%
Pigura lukisan	6	5,5 %
Rokok aqua dll	5	4,5 %
	110	100%

Distribusi responden berdasar jenis usaha ternyata didominasi oleh pengusaha kerajinan, yaitu sebanyak 42 pengusaha (38,2 %).

f. Lama menjadi pengusaha

Pengelompokan responden berdasarkan lama menjadi pengusaha diperlihatkan tabel 8.

Tabel 8.
Distribusi responden berdasar lamanya menjadi pengusaha

Lama menjadi pengusaha	Frekuensi	Persen
4 tahun s/d 11 tahun (baru)	37	33,6 %
12 tahun s/d 19 tahun (lama)	59	53,6 %
20 tahun s/d 27 tahun (sangat lama)	14	12,7 %
Total	110	100%
Mean = 12,88 tahun Minimum = 4 tahun Maksimum = 27 tahun		

Berdasarkan tabel tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah responden, dilihat dari lamanya menekuni pekerjaannya, didominasi pengusaha yang cukup lama menjadi pengusaha

(12 tahun s/d 19 tahun) yaitu 59 orang (53,6 %).

g. Totalitas menjalani pekerjaan

Berdasar totalitas dalam menjalani pekerjaan sebagai pengusaha, distribusi responden disajikan oleh Tabel 9.

Tabel 9.
Distribusi Responden Berdasar Totalitas Menjalani Pekerjaan

Jenis	Frekuensi	Persen
Pengusaha sebagai satu-satunya pekerjaan	99	90 %
Mempunyai pekerjaan sampingan	11	10 %
Total	110	100%

Berdasarkan tabel tersebut responden didominasi pengusaha tulen (90 %).

2. Ringkasan Data Penelitian

Sebelum dilakukan uji kesesuaian model yang dihipotesiskan, terlebih dahulu dipaparkan gambaran tentang skor jawaban responden pada variabel yang diteliti, yaitu persepsi

dan sikap pengusaha informal (pedagang kaki lima). Ringkasan data variabel diperlihatkan Tabel 10 dan Tabel 11.

Tabel 10.
Deskripsi data variabel

Variabel	Min	Maks	Rerata	Simp Baku	Persentil ke 33,33	Persentil ke 66,66
Persepsi	21	44	34,67	5,688	32	17
Sikap	10	28	18,77	3,088	38	20

Skor variabel dibagi menjadi tiga kelompok yaitu yang skornya rendah, sedang, dan tinggi. Kriteria tersebut ditentukan berdasarkan

kedudukan skor pada distribusinya (ukuran posisi relatif). Skor yang digolongkan rendah, posisinya antara nol sampai dengan persentil ke

33,33. Skor yang terletak antara persentil 33,34 s/d 66,66 dikategorikan sedang; dan skor di atas persentil ke 66,66 dikategorikan tinggi. Berdasarkan ketentuan

tersebut kemudian dibuat pengelompokan data pada masing-masing variabel seperti pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11.
Pengelompokan data variabel

Variabel \ Skor	Rendah		Sedang		Tinggi	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Persepsi	33	30%	39	35,5%	38	34,5%
Sikap	23	20,9%	43	39,1%	44	40%

Berdasarkan tabel tersebut ternyata distribusi skor yang tergolong rendah, sedang, dan tinggi pada umumnya adalah cenderung tinggi (*negatively skewed*). Untuk persepsi pengusaha: 30% tergolong rendah, 35,5% sedang, dan 34,5% tinggi. Sedangkan untuk sikap pengusaha 20,9% rendah (negatif); 39,1% sedang (rata-rata) dan 40% tergolong tinggi (positif).

3. Evaluasi Prasyarat SEM

Evaluasi persyaratan untuk melakukan analisis data digunakan SEM dengan dibantu program statistika yang dalam penelitian ini menggunakan program AMOS. Adapun evaluasi prasyarat untuk analisis data dengan SEM adalah: ukuran sampel, nilai ekstrim, dan normalitas univariat dan multivariat.

a. Ukuran Sampel

Pengusaha yang dijadikan sampel berjumlah 105. Dengan estimasi model menggunakan metode kemungkinan maksimum atau *maximum likelihood* (ML) sekurang-kurangnya diperlukan 100 sampel (Gozali, 2005). Menurut Gozali ketika sampel lebih dari 100, metode ML meningkat sensitivitasnya untuk

mendeteksi antar data namun begitu sampel di atas 400 - 500 maka metode ML selalu menghasilkan perbedaan signifikan sehingga ukuran kesesuaian menjadi jelek. Gozali merekomendasikan ukuran sampel antara 100 sampai 200 untuk metode ML.

b. Normalitas

SEM dengan menggunakan teknik estimasi kemungkinan terbesar atau *maximum likelihood* (ML), mensyaratkan dipenuhinya asumsi normalitas. Persyaratan yang biasanya digunakan adalah apabila nilai kritisnya $\leq \pm 2,58$, berarti peneliti dapat menerima asumsi normalitas pada tingkat probabilitas 0,01 (Santosa, 2007).

c. Nilai Ekstrim (*Outliers*)

Hasil analisis data penelitian dengan SEM yang dibantu program statistika Amos memperlihatkan bahwa data penelitian sudah memenuhi kriteria normalitas. Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai *c. r* (rasio kritis) dari data secara univariat dan multivariat dipenuhi untuk pengujian dengan ($c. r \geq \pm 2,58$).

Tabel 10.
Assessment of normality (Group number 1)

Variable	min	Max	Skew	c.r.	kurtosis	c.r.
PSIKOMOTORIK	3,000	7,000	,311	1,332	-,295	-,632
AFEKTIF	3,000	9,000	,487	2,087	,189	,405
KOGNITIF	4,000	14,000	,143	,610	-,169	-,361
HUBUNGAN	8,000	15,000	-,568	-2,434	-,308	-,660
PENGALAMAN	3,000	15,000	-,514	-2,203	-,565	-1,209
KEPENTINGAN	6,000	15,000	,144	,616	-,548	-1,174
Multivariate					-,372	-,199

Setelah dipenuhi syarat normalitas kemudian dilakukan uji hipotesis.

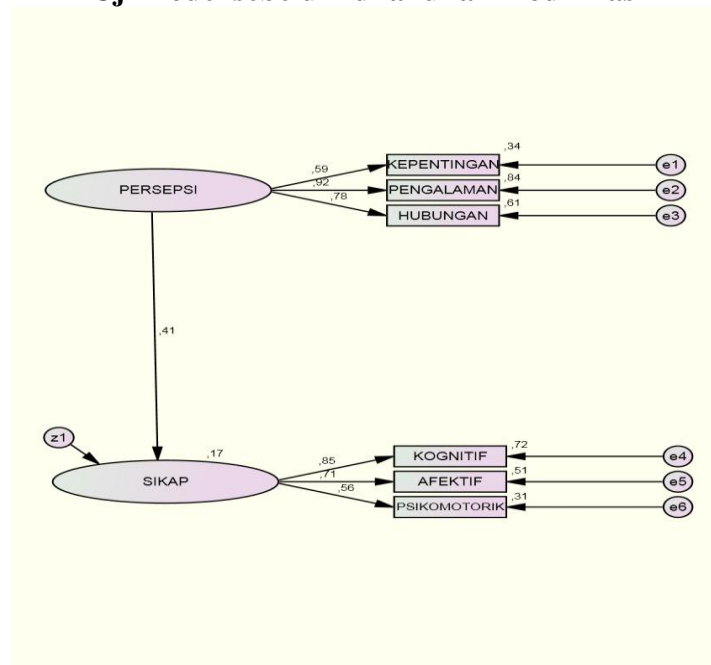
4. Evaluasi Model Persamaan Struktural

Dalam penelitian ini dilakukan perhitungan beberapa indeks sebagai indikator kesesuaian yaitu GFI (*goodness of fit index*), AGFI (*adjusted goodnes of fit index*), TLI (*Tucker-Lewis index*), CFI (*comparative fit index*), NFI (*normed*

fit index), dan RMSEA (*root mean square error of approximation*). Uji model dilakukan dengan tanpa melakukan modifikasi model dan dengan melakukan modifikasi model.

a. Dengan tanpa melakukan modifikasi model

Gambar 3.
Uji model sebelum dilakukan modifikasi



Tabel 11
Hasil uji model sebelum dilakukan modifikasi
CMIN

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	13	16,933	8	,031	2,117
Saturated model	21	,000	0		
Independence model	6	229,099	15	,000	15,273

RMR, GFI

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	,149	,953	,876	,363
Saturated model	,000	1,000		
Independence model	1,284	,560	,385	,400

Baseline Comparisons

Model	NFI Delta1	RFI rho1	IFI Delta2	TLI rho2	CFI
Default model	,926	,861	,960	,922	,958
Saturated model	1,000		1,000		1,000
Independence model	,000	,000	,000	,000	,000

RMSEA

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	,101	,029	,169	,098
Independence model	,362	,321	,404	,000

Hasil uji kesesuaian sebelum dilakukan modifikasi diperlihatkan Tabel 12

Tabel 12
Modification Indices

Indeks Kesesuaian	Nilai kritis	Nilai hitung	Keterangan
Kuadrat Chi	Kecil	16,933	-
Signifikansi probabilitas	$\geq 0,05$	0,031	Tidak sesuai
GFI	$\geq 0,90$	0,953	Sesuai
AGFI	$\geq 0,90$	0,876	Tidak sesuai
TLI	$\geq 0,95$	0,922	Tidak sesuai
CFI	$\geq 0,94$	0,958	Sesuai
NFI	$\geq 0,90$	0,926	Sesuai
RMSEA	$\leq 0,08$	0,101	Tidak sesuai

Untuk meningkatkan tingkat kesesuaian model, dilakukan modifikasi dengan bantuan

modification indices (MI) yang diperlihatkan pada Tabel 13.

Tabel 14
Hasil uji model setelah dilakukan modifikasi
CMIN

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	14	10,674	7	,153	1,525
Saturated model	21	,000	0		
Independence model	6	229,099	15	,000	15,273

RMR, GFI

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	,162	,970	,910	,323
Saturated model	,000	1,000		
Independence model	1,284	,560	,385	,400

Baseline Comparisons

Model	NFI	RFI	IFI	TLI	CFI
	Delta1	rho1	Delta2	rho2	
Default model	,953	,900	,983	,963	,983
Saturated model	1,000		1,000		1,000
Independence model	,000	,000	,000	,000	,000

Parsimony-Adjusted Measures

Model	PRATIO	PNFI	PCFI
Default model	,467	,445	,459
Saturated model	,000	,000	,000
Independence model	1,000	,000	,000

RMSEA

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	,069	,000	,148	,300
Independence model	,362	,321	,404	,000

Tabel 15
Ringkasan hasil setelah dilakukan modifikasi

Indeks Kesesuaian	Nilai kritis	Nilai hitung	Keterangan
Kuadrat Chi	Kecil	10,674	-
Signifikansi probabilitas	≥ 0,05	0,153	Sesuai
GFI	≥ 0,90	0,970	Sesuai
AGFI	≥ 0,90	0,910	Sesuai
TLI	≥ 0,95	0,963	Sesuai
CFI	≥ 0,94	0,983	Sesuai
NFI	≥ 0,90	0,953	Sesuai
RMSEA	≤ 0,08	0,069	Sesuai

Oleh karena kriteria kesesuaian sudah dipenuhi oleh model modifikasi tersebut berarti model tersebut mewakili pola hubungan diantara konstruk secara menyeluruh sehingga dapat dilakukan pengujian hipotesis. Sebuah model yang secara statistik ternyata sesuai dengan model data empiris bukan berarti model tersebut adalah satu-satunya model yang sesuai. Dengan kata lain, model tersebut hanyalah salah satu diantara sekian kemungkinan model hipotesis yang dapat diterima secara statistik.

5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis jalur dilakukan agar dapat menyajikan hubungan antara variabel-variabel laten secara menyeluruh dan dapat melakukan konfirmasi dimensi dari konsep berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Model yang diajukan tersebut setelah dimodifikasi ternyata *fit* sehingga pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan model tersebut. Pengujian dilakukan berdasarkan hasil perhitungan bobot regresi model penelitian (Tabel 16).

Tabel 16
Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
SIKAP	<---	PERSEPSI	,480	,151	3,186	,001	par_5
KEPENTINGAN	<---	PERSEPSI	1,000				
PENGALAMAN	<---	PERSEPSI	2,157	,351	6,143	***	par_1
HUBUNGAN	<---	PERSEPSI	1,157	,187	6,192	***	par_2
KOGNITIF	<---	SIKAP	1,000				
AFEKTIF	<---	SIKAP	,549	,103	5,316	***	par_3
PSIKOMOTORIK	<---	SIKAP	,368	,072	5,112	***	par_4

Tabel 17
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

			Estimate
SIKAP	<---	PERSEPSI	,378
KEPENTINGAN	<---	PERSEPSI	,597
PENGALAMAN	<---	PERSEPSI	,922
HUBUNGAN	<---	PERSEPSI	,779
KOGNITIF	<---	SIKAP	,859
AFEKTIF	<---	SIKAP	,714
PSIKOMOTORIK	<---	SIKAP	,563

Berdasarkan hasil analisis jalur hubungan antara variabel laten secara menyeluruh dan perhitungan bobot regresi dapat disimpulkan bahwa:

Ada pengaruh signifikan persepsi terhadap sikap. Berdasarkan Tabel 6. 16, pengaruh persepsi terhadap sikap adalah signifikan dengan nilai $c. r = 3,186$ ($c. r \geq \pm 2,58$ pada taraf signifikansi 0,01). Hal ini

menunjukkan bahwa persepsi berpengaruh terhadap sikap; semakin positif persepsi, semakin positif pula sikapnya dan sebaliknya.

a. Evaluasi hubungan kasualitas

Dengan terujinya kesesuaian model berarti hubungan kasualitas pada model dapat diuji dengan mempergunakan hasil perhitungan bobot regresi model penelitian yang disajikan pada Tabel 6. 16.

Berdasarkan hasil pengujian model yang dimodifikasi secara eksploratoris tersebut diperoleh kesimpulan tambahan di luar hubungan kasualitas yang dihipotesiskan, yaitu pengaruh variabel dengan komponen-komponen yang membangunnya seperti dapat dilihat pada Tabel 18 di bawah ini.

Tabel 18
Pengaruh Variabel dengan Komponen-Komponen yang Membangunnya

PERSEPSI	⇒	SIKAP	Signifikan
PERSEPSI	⇒	KEPENTINGAN	Signifikan
PERSEPSI	⇒	PENGALAMAN	Signifikan
PERSEPSI	⇒	HUBUNGAN	Signifikan
SIKAP	⇒	KOGNITIF	Signifikan
SIKAP	⇒	AFEKTIF	Signifikan
SIKAP	⇒	PSIKOMOTORIK	Signifikan

b. Pengaruh variabel eksogen terhadap endogen

Pengaruh langsung adalah pengaruh satu variabel terhadap variabel lain tanpa mediasi variabel lain, sedangkan pengaruh tidak langsung adalah pengaruh satu variabel terhadap variabel lain dengan dimediasi oleh variabel lain.

Pengaruh total merupakan jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh tidak langsung dan pengaruh total berguna untuk menjawab pertanyaan penting yang tidak dapat dijelaskan oleh pengaruh langsung. Tabel 19 menggambarkan pengaruh total, langsung dan tidak langsung tiap-tiap konstruk.

Tabel 19
Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Total

	PERSEPSI			SIKAP		
	LS	TD LS	TOT	LS	TD LS	TOT
HUBUNGAN	0,779	0,000	0,779	0,000	0,000	0,000
PENGALAMAN	0,922	0,000	0,992	0,000	0,000	0,000
KEPENTINGAN	0,597	0,000	0,779	0,000	0,000	0,000
KOGNITIF	0,000	0,325	0,325	0,859	0,000	0,859
AFEKTIF	0,000	0,270	0,270	0,779	0,000	0,714
PSIKOMOTORIK	0,000	0,213	0,213	0,563	0,000	0,563

Keterangan:

LS : pengaruh langsung
TD LS : pengaruh tidak langsung
TOT : pengaruh total

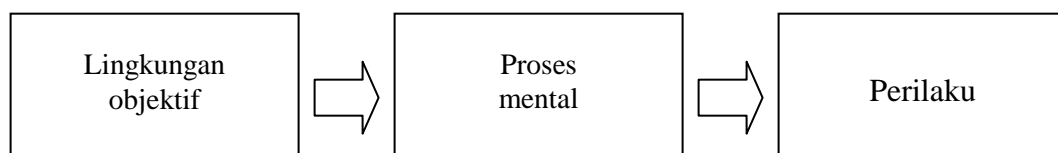
PEMBAHASAN

Kawasan Malioboro dihuni oleh berbagai macam pedagang kaki lima, antara lain: pedagang kaki lima yang berjualan dari pagi sampai malam hari yang berjualan bermacam-macam barang dagangan dan menghadap pertokoan - umumnya mereka anggota Koperasi Tri Dharma; pedagang kaki lima yang berjualan malam sampai pagi hari atau dikenal sebagai pedagang makanan lesehan - umumnya mereka juga merupakan anggota Koperasi Tri Dharma; pedagang kaki lima yang membuat atau menjual barang-barang kerajinan yang biasanya membelakangi pertokoan yang tergabung dalam Paguyuban Pemalni; dan pedagang kaki lima liar yaitu pedagang kaki lima yang tidak menjadi anggota Koperasi Tri Dharma maupun Paguyuban Pemalni yang berjualan di Kawasan Malioboro. Pedagang kaki lima di Kawasan

Malioboro secara umum cukup berpendidikan (terbukti mayoritas telah lulus SLTP ke atas), namun karena persaingan mencari kerja yang begitu ketat dan kurangnya ketrampilan untuk memasuki dunia kerja di sektor formal, maka pilihan menjadi pedagang kaki lima menjadi salah satu alternatif pekerjaan yang paling mungkin dilakukan. (<http://www.facebook.com/topic.php?uid=109392529085645&topic=19>).

Sikap para pedagang kaki lima (yang biasa disingkat PKL) terhadap kebijakan pemerintah kota dapat difaham dengan dasar paradigma psikologi ekonomi menurut Katona (dalam Van Raij, 1981) lingkungan/keadaan (pendapatan, asset, status jabatan/sosial ekonomi, dan sebagainya) mempengaruhi proses mental pengusaha bersama-sama dengan sikap dan ekspektasi ekonomi.

Gambar 3.
Paradigma dasar psikologi ekonomi pengusaha



Sikap dan ekspektasi dengan mempertimbangkan situasi personal dan ekonomi (secara keseluruhan) mempengaruhi perilaku ekonomi, misal perilaku dalam merespon kebijakan pemerintah terhadap keberadaan mereka, perilaku dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, perilaku dalam

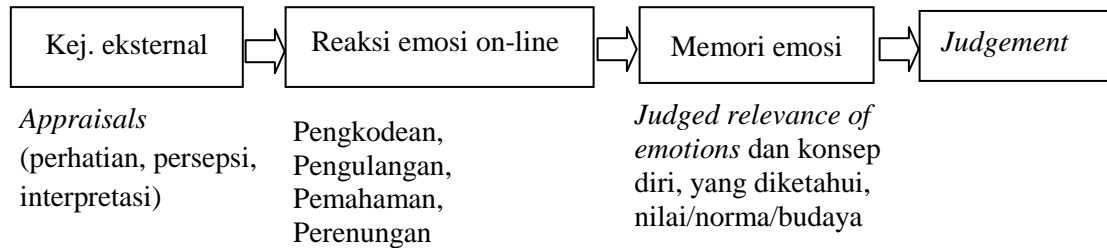
meningkatkan kualitas produk, dan sebagainya.

Berdasarkan gambar 3, lingkungan objektif adalah sebagai stimulus (S) yang mempengaruhi individu dan proses mental yang identik dengan organisme (O) sedangkan perilaku adalah sebagai tanggapan dari organisme (R).

Ringkasan penjelasan proses menetapkan seberapa seseorang menyukai kehidupan yang ia alami disajikan gambar 6. 4. Setiap tahap

proses penetapan dipengaruhi oleh berbagai faktor (diantaranya adalah persepsi pengusaha).

Gambar 4
Tahapan proses menetapkan sikap



Sumber: Diener et al., (2003).

Kejadian eksternal yang mempengaruhi proses pembentukan sikap pengusaha informal terhadap kebijakan pemerintah dalam membina mereka didahului dengan sosialisasi Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002, yang memuat ketentuan umum, lokasi, perizinan, syarat dan tata cara perizinan, kewajiban dan larangan, fasilitas pembinaan, pengawasan, ketentuan pidana, penyidikan, sanksi administratif, dan ketentuan penutup.

Perda tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Yogyakarta harus diikutsertakan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha di sektor formal sangat terbatas, di sisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha, sehingga mendorong kegiatan usaha termasuk di dalamnya

yang dilaksanakan oleh pedagang kakilima dengan tetap memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penataan PKL.

Penataan pedagang kakilima dalam Peraturan Daerah ini mempunyai dua peranan yang sangat penting, yaitu satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan PKL di kota Yogyakarta, sedangkan di sisi lainnya Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota untuk melakukan fasilitasi/pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kakilima. Selain hal tersebut di atas tujuan penataan PKL juga untuk mewujudkan sistim perkotaan Kota Yogyakarta yang seimbang, aman, tertib, lancar dan sehat. Oleh karena itu disamping pedagang kakilima diberi kesempatan untuk dikembangkan, namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya juga harus tetap terjaga.

Salah satu reaksi terhadap rencana pemberlakuan Perda No 26 tahun 2002

tersebut tersebut tercatat dalam Harian Suara Merdeka 27 April 2004 (<http://www.suaramerdeka.com/harian/0404/27/ked03.htm>). Pedagang angkringan dan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan A Yani dan Malioboro memasang , Harian memasang poster di sepanjang jalan itu. Mereka menolak penertiban yang bakal dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta. Mereka juga menyebarkan pernyataan dan ajakan ke pedagang angkringan dan kaki lima untuk berjualan di sebelah barat Jalan A Yani dan Malioboro. Namun tampaknya aksi itu tak mendapat sambutan dari warga masyarakat dan pedagang lain. Warga masyarakat yang melalui jalan itu tampak tak begitu tertarik pada aksi mereka. Karena, warga masyarakat mengetahui menertibkan tersebut bertujuan agar masyarakat umum tak terganggu ulah pedagang yang berjualan seenak hati, tanpa menghiraukan peraturan.

Sebenarnya para pedagang angkringan dan kaki lima bukan menolak untuk ditata. Namun mereka meminta Pemerintah Kota Yogyakarta bertindak bijaksana. Mereka menolak bila digusur dari tempat semula. Ketua Paguyuban Pedagang Angkringan Malioboro Yogyakarta (PPAMJ), Ali, menyatakan pengusuran yang dilakukan Pemerintah Kota merupakan tindakan sewenang-wenang. Itu menunjukkan sikap kurang bersahabat. Apalagi pedagang angkringan dan kaki lima dilarang berjualan di sebelah barat jalan dengan gerobak. Mereka boleh berjualan, asal memakai tenongan. Namun itu tak masuk akal. "Masa air panas dan api serta lain-lain harus kami *sunggu*," kata Ali.

Pertengahan April lalu para pedagang angkringan dipanggil aparat Kecamatan Gedongtengen. Dalam

pertemuan itu aparat memberikan penjelasan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta meminta pedagang segera pindah berjualan ke sebelah timur. Namun para pedagang menolak, dengan alasan bakal tidak laku. Seminggu kemudian aparat pemerintah kembali mengundang para pedagang untuk membicarakan masalah itu. Bahkan Pemerintah Kota Yogyakarta mengancam bila pedagang tidak segera pindah akan ada tindakan reperensif. Namun pedagang tetap tak mau pindah. Mereka berjualan seperti biasa.

Dua hari kemudian aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibantu polisi dan TNI meminta para pedagang segera pindah ke sebelah timur jalan. Tetapi setelah mereka pindah, banyak pedagang tak mendapatkan tempat berjualan. Karena itulah para pedagang ngotot tak akan pindah. Dalam aksi pemasangan poster, mereka menyeru pedagang lain berdagang bersama-sama di sebelah barat Jalan Malioboro.

Sosialisasi terus dilakukan melalui ketua-ketua kelompok pedagang, anggota melalui berbagai pertemuan yang diadakan oleh RW dan Kecamatan setempat dan Koperasi hingga akhirnya mereka memberikan dukungan terhadap pentaan Perda.

(<http://jogjanews.blogspot.com/2004/05/warga-kawasan-malioboro-dukung-penuh.html>). Tidak dapat dipungkiri bahwa sikap yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tidak bertepuk sebelah tangan. Penataan PKL khususnya angkringan yang sebelumnya mendapat tentangan keras dari beberapa orang, namun secara nyata, warga yang berada di kawasan Malioboro mendukung bahkan mengeluarkan pernyataan sikapnya terhadap peraturan PKL (Perda Kota Yogyakarta No 26 Tahun 2002 tentang

penataan PKL dan Keputusan Walikota Yogyakarta No 88 Tahun 2003 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta mengenai Perda No 26 Tahun 2002) serta tanggapan atas insiden yang terjadi pada Kamis (13/5).

Reaksi keras dan pelanggaran disebabkan oleh adanya pedagang-pedagang yang mau seenaknya sendiri dan yang tidak berizin. Jumlah PKL yang tergolong liar ternyata cukup banyak dan sering melakukan pelanggaran terhadap Perda (<http://www2.rri.co.id/index.php/component/content/article/44-index-berita-terbaru/590-40-persen-pkl-di-jogyakarta-belum-berijin>). Menurut sumber tersebut sebanyak 40 persen PKL di kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Y, hingga kini belum memiliki izin. Kepala Seksi Pemasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) kota Yogyakarta, Beni Benedik, kepada KBRN, Sabtu (29/1), mengatakan pihaknya akan melakukan pendataan dan mencoba membina pedagang yang tidak berizin.

Semakin positifnya persepsi dan sikap pedagang terhadap Perda No 26 tahun 2002 tersebut ditengarai juga dengan menurunnya jumlah pelanggaran terhadap Perda tersebut. Dari 1.111 pedagang kaki lima (PKL) nakal yang berhasil dirazia oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, 29,43% di antaranya mendapat penindakan proyustisia. Kepala Dinas Ketertiban Wahyu Widayat kepada wartawan kemarin mengakui adanya penurunan pelanggaran perda secara umum. Penurunan tersebut lebih dirasakan karena kesadaran masyarakat Kota Yogyakarta saat ini dinilai bertambah untuk mematuhi segala aturan yang berlaku. "Sejak Januari hingga Oktober

2010 ini kami berhasil mengamankan 1.111 PKL nakal yang biasanya mangkal di tempat yang tidak diperbolehkan. PKL yang seperti ini tergolong PKL liar," ujarnya di Balai Kota. Wahyu menjelaskan, Kota Yogyakarta memiliki 16 jenis Perda yang menjadi kewenangan Dintib untuk menegakkannya. Penurunan pelanggaran bukan dikarenakan adanya indikasi kebocoran informasi sebelum Dintib melakukan razia. Hal ini diyakininya lebih dikarenakan adanya perlakuan tindak pidana ringan (tipiring) pada pelanggar perda. " Saya rasa kebocoran informasi razia sangat kecil, mungkin hanya sekitar 10% razia yang diketahui selama ini," tandasnya. Wahyu menambahkan, tak hanya merazia PKL liar, pihaknya juga gencar melakukan operasi penertiban, utamanya pada pamflet yang berupa spanduk, baliho, rontek, dan aksi vandalisme.

Kesadaran pedagang untuk mentaati Perda di atas sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan positifnya persepsi dan sikap pedagang terhadap kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima melalui Perda No 26 tahun 2002. Pedagang yang persepsinya negatif (30%), netral (35,5%), dan yang positif 34,5%. Sementara untuk sikap, pedagang yang sikapnya negatif (20,9%), yang netral (39,1%), dan yang positif (40%)

SIMPULAN DAN SARAN

Model sikap pengusaha yang dihipotesiskan tersebut ternyata didukung dengan data empiris; ada pengaruh persepsi terhadap sikap pengusaha informal pada kebijakan pemerintah pada pembinaan pengusaha informal. Pengalaman pengusaha berkali-kali mengikuti sosialisasi dan

berkomunikasi dengan aparat Pemda, membuat mereka semakin sadar bahwa penertiban tersebut juga demi kepentingan pedagang juga. Kesadaran ini membuat sikap mereka juga semakin positif karena mereka semakin merasakan manfaatnya, semakin memahami niat baik pemerintah sehingga mereka mendukung pelaksanaan Perda.

Dukungan-dukungan dari para tokoh-tokoh mereka terus mengalir dan jumlah pelanggaran yang semakin turun menunjukkan bahwa sikap mereka terhadap penertiban semakin positif.

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap pengusaha pada kebijaksanaan pemerintah dalam pembinaan pedagang.
2. Persepsi pengusaha berpengaruh terhadap kepentingan
3. Persepsi pengusaha berpengaruh terhadap pengalaman
4. Persepsi berpengaruh terhadap hubungan
5. Sikap berpengaruh terhadap pemahaman kognitif
6. Sikap berpengaruh terhadap perasaan (afektif)
7. Sikap berpengaruh terhadap tindakan (psikomotorik)

Sikap positif pengusaha menjadi persyaratan penting bagi keberhasilan pemerintah dalam suatu penerapan Peraturan Daerah. Dengan memiliki sikap yang positif, pengusaha akan dapat mendukung pelaksanaan Perda dalam membina keberadaan pedagang kaki lima

sehingga mereka dapat memahami niat baik pemerintah, merasakan manfaat kebijaksanaan pemerintah, dan membantu kesulitan pemerintah. Sebaliknya, sikap yang negatif pengusaha akan menghambat penerapan Perda. Untuk membangun sikap yang positif, pemerintah perlu melakukan pembangunan persepsi agar para pedagang merasa memiliki kepentingan yang sama dengan pemerintah, memiliki pengalaman yang positif dengan adanya pembinaan tersebut, serta memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan aparat pemerintah.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyarankan

- a. Berdasarkan temuan bahwa pengaruh kognitif terhadap sikap pedagang relatif lebih besar dibandingkan pengaruh afektif dan psikomotorik maka disarankan urutan prioritas (yang diutamakan) untuk membangun sikap positif adalah dengan memberi penjelasan dan sosialisasi tentang Perda baru kemudian bagaimana memberikan rasa aman (afektif) dan selanjutnya memberikan penjelasan tentang sanksi terhadap pelanggaran agar tidak membangkang (psikomotorik).
- b. Berdasarkan temuan bahwa pengaruh pengalaman terhadap persepsi relatif lebih besar dibanding hubungan dan kepentingan maka urutan prioritas (yang diutamakan) untuk membangun persepsi yang positif adalah dengan mengutamakan tindakan persuasif untuk memberikan

pengalaman positif kepada para pedagang. Para pedagang perlu diperlakukan dengan santun dan manusiawi jangan sampai tindakan aparat pemerintah membuat mereka tertekan, takut dan cemas. Prioritas selanjutnya adalah membangun hubungan yang harmonis dengan menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan pedagang.

Pengusaha sektor informal sering tidak terwakili dalam wacana dalam studi usaha mikro, kecil, dan menengah, meskipun usaha mikro, kecil, dan menengah tengah menjadi primadona dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada saat keadaan ekonomi membaik, keberadaan mereka justru semakin terdesak dengan pemodal-pemodal besar.

Kebijakan pemerintah juga sering kurang berfihak PKL mereka karena keberadaan mereka sering dianggap mengganggu keindahan dan kebersihan kota. Perbedaan pencapaian kebutuhan yang berbeda antara pengusaha informal dan elit pemerintah sering menimbulkan konflik kepentingan. Elit pemerintah dan pembuat kebijakan sudah mencapai taraf aktualisasi diri, sementara pengusaha informal masih berfikir masalah kebutuhan “perut” sehingga mereka belum saatnya untuk diajak berfikir tentang keindahan.

Penataan PKL di jalan Malioboro dan sekitarnya menunjukkan bahwa penerapan suatu kebijakan pemerintah berhasil mendapat dukungan masyarakat karena aparat pemerintah berhasil membangun

persepsi yang positif dengan secara terus-menerus mengkomunikasikan rencana pemerintah tersebut dan mensosialisasikannya melalui berbagai kesempatan yang ada. Aparat pemerintah juga berhasil membangun persepsi yang positif melalui pendekatan persuasif yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pihak yang ingin mendapat dukungan dalam suatu penertiban tempat usaha perlu memperhatikan proses dalam membangun sikap positif yaitu dengan membangun persepsi yang positif.

REFERENSI

- Bandura, A. (2001). *Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective*. *Annu. Rev. Psychology*. 2001, 52:1-26
- Csikszentmihalyi, M. (1999). *If we are so rich, why aren't we happy?* *American Psychologist*, 55, 821-827.
- Ed Diener & Tov, W. (2004). *Culture and Subjective Well-Being*. Department of Psychology University of Illinois. Nebraska Press: Draft 9/6/2004.
- Ghozali, I. (2001). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2005). *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS Ver. 5.0*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Kaldor, P., Hughes, P., Castle, K., & Bellamy, J. (2004). *Spirituality and Well-Being in Australia*. A joint project of: Anglicare

- Kuncoro, M. Dan Anggito, A. (1995). "Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Debirokratisasi." *Kelola* (Gajah Mada University Bussiness Review) no 10/IV/1995
- Kuncoro, M, dkk. (1996). "Laporan Akhir Pengembangan Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil tahun anggaran 1995/1996 Provinsi DIY." Kerja sama Depkop dan PPK dengan PPE-FE UGM Yogyakarta
- Kuncoro, M. (2000). *Usaha Kecil di Indonesia: Profil, Masalah, dan Strategi Pemberdayaan*. Makalah diseminarkan di STIE Kerjasama Yogyakarta, 18 November 2000
- Myers, D. G. (2003). *Social Psychology*. Boston: McGraw-Hill.
- Robbins, S. P. (2001). *Perilaku Organisasi Jilid I*. Jakarta: PT Prenhllindo.
- Supranto, J. (2004). *Analisis Multivariat Arti dan Interpretasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Suprihanto, J. (2002). *Hubungan Industrial Edisi I*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Wahyuni, R. T. (2002). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan pada Toko Alfa Gudang Rabat*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Walgito, B. (2003). *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Widjaja, A. R. (2003). "Loyalitas Pelanggan Klub Arena Hotel Ciputra Semarang Ditinjau dari Persepsi terhadap Mutu Pelayanan Petugas Front Liner". Skripsi Fakultas Psikologi UNIKA Sugiyopranoto, Semarang.